



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 25 Juni 2021

Halaman: 2



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

PANDEMI BUKAN AJANG CARI PANGGUNG

Penanganan Hulu-Hilir Masih Belum Sinkron

YOGYA (KR) - Pola penanganan Covid-19 di Kota Yogya dinilai belum optimal. Meski sudah dibentuk Satgas khusus namun beberapa kebijakan oleh kepala daerah masih belum terintegrasi. Artinya, pola penanganan dari hulu hingga hilir belum sinkron dengan kondisi lapangan, khususnya masyarakat umum terdampak atau warga sipil menengam ke bawah.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari SPd, mencontohkan kebijakan PPKM mikro yang dibuat linier dari aturan di atasnya namun tidak dibarengi sarana dan prasarana untuk relawan atau satgas di wilayah. "Misal diberikan APD dan alat pelindung lainnya. Begitu juga bantuan pemakanan untuk warga isolasi mandiri masih begitu sangat rumit terkait mekanismenya," ungkapnya.

Anggota Fraksi Gerindra ini juga mengkritisi tidak adanya diskresi anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) terkait kebijakan untuk pemangku wilayah. Terutama yang berada di sektor kelurahan dan kementren hingga akhirnya antar pemangku wilayah saling berargumen sendiri-sendiri. "Jadup untuk warga isolasi mandiri dengan mengikutsertakan peserta Gandeng Gendong menurut kami cukup bagus dalam hal pemberdayaan. Tetapi mohon tata kala pen-

Dhian Novitasari SPd
Wakil Ketua DPRD
Fraksi Gerindra



KR-Istimewa

gung. Pihaknya selaku keterwakilan masyarakat terpilih di DPRD Kota Yogya berharap jajaran pejabat yang terlibat dalam penanganan tim satgas kota memperbaiki sistem aturan dan komando dari lini kepala daerah. "Sampaikan visi target jangan mengedepankan ego sektoral semata. Pandemi ini tidak untuk mencari panggung, tetapi kita harus punya target visi yang sama, saling bersinergi untuk pencapaian perlindungan terhadap masyarakat Kota Yogya," imbuhnya.

Sedangkan program vaksinasi, diharapkan dibuat sistem gulungan ombak. Artinya tidak ada istilah jeda, mulai dari pendataan warga untuk divaksin hingga jadwal penyuntikan. Dari segala lini stakeholder beberapa dinas harus bersinergi. Mulai sinkronisasi data kependudukan, manajemen teknologi informasi, tenaga kesehatan, ketersediaan vaksin serta sarana prasarana tempat untuk memvaksin.

"Libatkan unsur swasta yang ada di kota baik dari pariwisata, UMKM, industri maupun sekolah tinggi ilmu kesehatan untuk bersama-sama bersinergi mengupayakan target sasaran vaksinasi sebesar 80 persen. Komunikasi politik antar pemangku kebijakan harus terus berjalan dalam upaya program vaksin dan pemulihan ekonomi," tandas Dhian. (Dhi)-f

☐ Negatif ☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM			

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005